

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PERHUBUNGAN



RENCANA KERJA PERUBAHAN
(RENJA-P)
TAHUN 2024

Jl. Gajah Mada No. 116 Praya 83511
Email: dishub.lomboktengahkab@gmail.com
Website: perhubungan.lomboktengahkab.go.id



**RENCANA KERJA PERUBAHAN
TAHUN 2024
(RENJA-P 2024)**



**DISUSUN OLEH:
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 ini disusun dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Perubahan merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024 yang menyajikan data perencanaan, evaluasi dan pencapaian kerja Triwulan II tahun berjalan, serta informasi kinerja OPD lainnya.



Praya, 31 Juli 2024
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lombok Tengah,

Dr. S. H. LALU HERDAN, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196908151998031007

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI TRIWULAN II	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai Triwulan II Tahun Anggaran 2024.....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	26
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	28
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	31
BAB IV PENUTUP.....	36

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024.....	8
Tabel 2.2	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang Belum Memenuhi Target yang Ditetapkan.....	19
Tabel 2.3	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang Memenuhi Target yang Ditetapkan.....	21
Tabel 2.4	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang Melebihi Target yang Ditetapkan.....	23
Tabel 2.5	Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024.....	24
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	27
Tabel 3.1	Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024	32

DAFTAR LAMPIRAN

Lamp 1	Rencana Kerja dan Anggaran Kegiatan Administrasi Keuangan	
	Perangkat Daerah	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) merupakan dokumen perubahan perencanaan kerja sebuah Perangkat Daerah dalam tahun anggaran berjalan yang disusun berdasarkan kewenangan, tugas pokok, dan fungsi suatu perangkat daerah, disamping juga dengan berpedoman pada Rencana Strategis dan RPJMD.

Sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah, Renja-P memiliki arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah dengan mengingat beberapa hal sebagai berikut:

- a. Renja-P merupakan dokumen yang secara substansial menguraikan visi, misi, program, dan kegiatan perangkat daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis sesuai dengan RKPD Perubahan;
- b. Renja-P merupakan dokumen dasar penyusunan program/kegiatan perangkat daerah kedalam KUPA-PPAS serta penyusunan dan perencanaan program/kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Tahun 2024;
- c. Renja-P juga merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan perangkat daerah untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja dalam tahun berjalan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas serta berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 sebagai pedoman rencana kerja

yang memuat tentang arah kebijakan, program dan kegiatan, dan hal yang ingin dicapai pada tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah mengacu pada:

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah

8. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah;
9. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026.

Adapun *output* dan *outcome* yang dilaksanakan merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi urusan perhubungan, dengan mempedomani:

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum LLAJ
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas
7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja Perubahan ini disusun dengan maksud antara lain sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman bagi seluruh pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2024;
2. Untuk menjamin keterpaduan dan konsistensi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, maupun pengawasan sebagai implementasi dari Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD-P), serta untuk mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya yang ada.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini adalah untuk:

1. Sebagai dasar penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun 2024 dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja OPD;
2. Menjabarkan rencana strategis kedalam rencana operasional;
3. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan;
4. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi melalui capaian target kinerja program dan kegiatan

1.4 Sistematika Penulisan

Secara sistematis penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan

BAB II **HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI**
TRIWULAN II

Bab ini berisi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai Triwulan II (Tahun Berjalan), Analisis Kinerja Pelayanan, serta Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

BAB III **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini berisi Rencana Kerja Perubahan dan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

BAB V **PENUTUP**

Bab ini berisi Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian, Kaidah-kaidah Pelaksanaan, dan Rencana Tindak Lanjut

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN ANGGARAN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2024 dilakukan melalui metode *gap analysis*, yaitu dengan cara membandingkan realisasi capaian kinerja dan target Renja yang telah ditetapkan.

Adapun Sasaran Strategis serta Sasaran Program/Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 (n-1) dan tahun 2024 (tahun berjalan) adalah sebagai berikut:

- Sasaran Strategis: Meningkatnya Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas dicapai melalui pelaksanaan Program dan Kegiatan sebagai berikut:
 - I. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan kegiatan-kegiatan:
 1. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 2. Kegiatan Penerbitan Ijin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
 3. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 4. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 5. Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
 6. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - II. Program Pengelolaan Pelayaran dengan Kegiatan Penerbitan Ijin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan:

1. Kegiatan Penerbitan Ijin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota

2.1.1 Evaluasi Pencapaian target Kinerja Renja Tahun 2024 dan Pencapaian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah

Berikut akan disajikan pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah yang ditampilkan pada Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Perhubungan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 sebagaimana Tabel 2.1 (T-C.29) berikut ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 Kabupaten Lombok Tengah

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah

No	Sasaran Perangkat Daerah	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sd. Tahun 2023 (n-1)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sd. Tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Target Renja Perangkat Daerah TW II Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah TW II Tahun 2024	Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024 (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd. Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(9/8)	11=(6+9)	12=(11/5)
		Urusan: Perhubungan									
		Bidang Urusan: Perhubungan									
		Meningkatnya Kelancaran dan Ketertiban Lalu Lintas	V/C Ratio	0,24	0,26	0,25	-	-	-	0,26	91,67
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD (poin)	BB	B	BB	-	-	-	B	
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase IKU OPD yang Tercapai (%)	100	100	100	50	49	98	49	49,00
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	30	15	4	2	2	100	17	56,67

No	Sasaran Perangkat Daerah	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sd. Tahun 2023 (n-1)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sd. Tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Target Renja Perangkat Daerah TW II Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah TW II Tahun 2024	Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024 (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd. Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(9/8)	11=(6+9)	12=(11/5)
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (dokumen)	180	90	30	10	10	100	100	55,56
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan Keuangan OPD yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3612	1806	602	344	352	102,33	2158	59,75
		Sub Kegiatan Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	90	45	15	6	6	100	51	56,67

No	Sasaran Perangkat Daerah	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sd. Tahun 2023 (n-1)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sd. Tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Target Renja Perangkat Daerah TW II Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah TW II Tahun 2024	Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024 (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd. Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(9/8)	11=(6+9)	12=(11/5)
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Validasi Data Aset OPD	100	100	100	50	58	116	58	58,00
		Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	30	15	5	2	2	100	17	56,67
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM dengan Capaian Kinerja Lebih dari 80%	100	100	100	100	91	91	91	91
		Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	90	45	15	6	6	100	51	56,67
		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	14	5	3	3	3	100	8	57,14
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Pekerjaan sesuai SOP	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Sasaran Perangkat Daerah	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sd. Tahun 2023 (n-1)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sd. Tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Target Renja Perangkat Daerah TW II Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah TW II Tahun 2024	Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024 (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd. Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(9/8)	11=(6+9)	12=(11/5)
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40	15	15	15	15	100	30	75,00
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan dan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	72	36	12	6	6	100	42	58,33
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	165	120	105	52	52	100	120	72,77
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Validasi Data Aset OPD	100	100	100	50	58	116	58	58,00
		Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	52	48	1	1	1	100	49	94,23
		Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dibangun	4	2	-	-	-	-	2	50
		Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	2	-	-	-	-	2	40

No	Sasaran Perangkat Daerah	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sd. Tahun 2023 (n-1)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sd. Tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Target Renja Perangkat Daerah TW II Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah TW II Tahun 2024	Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024 (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd. Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(9/8)	11=(6+9)	12=(11/5)
		Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyelesaian Pekerjaan sesuai SOP dan Tepat Waktu	100	100	100	100	100	100	100	100,0
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72	36	12	6	6	100	42	58,33
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72	36	12	6	6	100	42	58,33
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Kondisi Baik	100	100	100	100	94	94	94	94
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	294	144	45	23	14	60,87	158	53,74

No	Sasaran Perangkat Daerah	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sd. Tahun 2023 (n-1)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sd. Tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Target Renja Perangkat Daerah TW II Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah TW II Tahun 2024	Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024 (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd. Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(9/8)	11=(6+9)	12=(11/5)
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	6	2	1	-	-	-	2	33,33
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Sarpras Keselamatan Jalan	79,90	66,11	69,00	66,12	66,12	100	66,12	82,75
		Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlengkapan Jalan yang Terpasang	75,00	44,02	65,00	44,03	44,03	100	44,03	58,69
		Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	112500	66034	97500	66046	66046	100	66046	58,70
		Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	7015	3512	1005	500	500	100	4517	64,39
		Kegiatan Pengelolaan Terminal Tipe C	Persentase Sarana dan Prasarana Terminal yang Tersedia	50,98	39,22	-	-	-	-	39,22	76,93

No	Sasaran Perangkat Daerah	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sd. Tahun 2023 (n-1)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sd. Tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Target Renja Perangkat Daerah TW II Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah TW II Tahun 2024	Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024 (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd. Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(9/8)	11=(6+9)	12=(11/5)
		Sub Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	26	20	-	-	-	-	20	76,93
		Kegiatan Penerbitan Ijin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Lokasi Parkir yang Tergarap	100	68,97	83,64	76,31	68,97	90,38	68,97	68,97
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Ijin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	72	36	12	6	6	100	42	58,33
		Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan yang Laik Jalan	100	54,64	98	76,32	30,38	39,80	98	39,80
		Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	10	10	-	-	-	-	10	100
		Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang disediakan	45156	12000	4000	-	-	-	12000	26,57

No	Sasaran Perangkat Daerah	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sd. Tahun 2023 (n-1)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sd. Tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Target Renja Perangkat Daerah TW II Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah TW II Tahun 2024	Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024 (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd. Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(9/8)	11=(6+9)	12=(11/5)
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	42	22	9	-	-	-	22	52,38
		Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan	100	100	100	50	50	100	50	50,00
		Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	72	36	12	6	6	100	42	58,33
		Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Kepatuhan Pengguna Jalan dalam Berlalu Lintas	100	80,52	90	-	-	-	80,52	80,52
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	72	36	12	6	6	100	42	58,33

No	Sasaran Perangkat Daerah	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sd. Tahun 2023 (n-1)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sd. Tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Target Renja Perangkat Daerah TW II Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah TW II Tahun 2024	Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024 (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd. Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(9/8)	11=(6+9)	12=(11/5)
		Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Trayek Angkutan Umum yang Dinormalisasi	100	0	14	0	0	0	0	0
		Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu)	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	72	36	12	6	6	100	42	58,33
		Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Penerbitan PAS Kecil Angkutan Laut	100	77,5	98	96	84,17	90,51	84,17	84,17
		Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan PAS Kecil Angkutan Laut	600	465	588	565	505	85,88	505	84,17

No	Sasaran Perangkat Daerah	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sd. Tahun 2023 (n-1)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sd. Tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Target Renja Perangkat Daerah TW II Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah TW II Tahun 2024	Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024 (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd. Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(9/8)	11=(6+9)	12=(11/5)
		Sub Kegiatan Kordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	72	36	12	6	6	100	42	58,33

Dari Tabel 2.1 di atas dapat dikemukakan beberapa hasil evaluasi terhadap pencapaian target kinerja Renja Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Triwulan II adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Renja Tahun 2024, telah dilaksanakan 1 Urusan, 3 Program, 15 Kegiatan, dan 25 Sub Kegiatan;
2. Dari 3 Program tersebut, sampai dengan Tri Wulan II terdapat 1 Program yang memenuhi target yang ditetapkan dan 2 Program lainnya belum memenuhi target yang ditetapkan;
3. Dari 15 Kegiatan, terdapat 8 Kegiatan yang belum memenuhi target yang ditetapkan, 5 Kegiatan mencapai target sesuai yang ditetapkan, serta 2 Kegiatan yang melebihi target yang ditetapkan;
4. Dari 25 Sub Kegiatan, terdapat 5 Sub Kegiatan yang belum memenuhi target yang ditetapkan, 19 Sub Kegiatan yang memenuhi target yang ditetapkan, dan 1 Sub Kegiatan yang melebihi target yang ditetapkan;
5. Adapun rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Renja Tahun 2024 sampai dengan Tri Wulan II dapat diuraikan pada Tabel-tabel berikut ini:

a. Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Belum Memenuhi Target yang Ditetapkan

Rekapitulasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target yang ditetapkan diuraikan pada Tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang
Belum Memenuhi Target yang Ditetapkan
pada Triwulan II Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD (poin)	BB	-	-
2	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase IKU OPD yang Tercapai (%)	50	49	98
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM dengan Capaian Kinerja Lebih dari 80%	100	91	91
4	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Kondisi Baik	100	94	94
5	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23	14	60,87
6	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	-	-	-
7	Kegiatan Penerbitan Ijin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Lokasi Parkir yang Tergarap	76,31	68,97	90,38
8	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan yang Laik Jalan	76,32	30,38	39,80
9	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	-	-	-
10	Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang disediakan	-	-	-
11	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	-	-	-
12	Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Kepatuhan Pengguna Jalan dalam Berlalu Lintas	-	-	-
13	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Trayek Angkutan Umum yang Dinormalisasi	-	-	-
14	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Penerbitan PAS Kecil Angkutan Laut	96	84,17	90,51
15	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan PAS Kecil Angkutan Laut	588	505	85,88

Pada Triwulan II Tahun Anggaran 2024, terdapat beberapa indikator pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang belum memenuhi target yang telah ditetapkan karena beberapa hal sebagai berikut:

1. Realisasi atas program/kegiatan tersebut baru dapat dihitung pada akhir tahun anggaran, yaitu pada indikator:
 - 1) V/C Rasio;
 - 2) Nilai SAKIP OPD;
 - 3) Persentase kepatuhan pengguna jalan dalam berlalu lintas;
2. Realisasi atas indikator Kegiatan/Sub Kegiatan yang memang direncanakan untuk direalisasikan pada Triwulan III atau Triwulan IV, yaitu pada indikator:
 - 1) Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi, yaitu berupa pengecatan kantor yang direncanakan akan dilaksanakan pada Triwulan III;
 - 2) Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia yang direncanakan selesai pada Triwulan III;
 - 3) Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang disediakan, yaitu berupa pengadaan Bukti Lulus Uji Elektronik yang akan direalisasikan pada Triwulan IV;
3. Pada Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Trayek yang dinormalisasi, pada Tahun Anggaran 2024 ini juga tidak dapat terealisasi seperti tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena tidak tersedianya anggaran untuk melakukan normalisasi trayek.

b. Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Telah Memenuhi Target yang Direncanakan

Rincian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang memenuhi target pada Triwulan II Tahun Anggaran 2024 dapat diuraikan pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang
Memenuhi Target yang Ditetapkan
pada Triwulan II Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	2	2	100
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (dokumen)	10	10	100
3	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan Keuangan OPD yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100
4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	6	6	100
5	Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2	2	100
6	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6	6	100
7	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3	3	100
8	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Pekerjaan sesuai SOP	100	100	100
9	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15	15	100
10	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan dan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	6	100
11	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52	52	100
12	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	1	100
13	Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyelesaian Pekerjaan sesuai SOP dan Tepat Waktu	100	100	100
14	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	6	6	100

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
		Disediakan			
15	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6	6	100
16	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Sarpras Keselamatan Jalan	66,12	66,12	100
17	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlengkapan Jalan yang Terpasang	44,03	44,03	100
18	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	66046	66046	100
19	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	500	500	100
20	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Ijin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Ijin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	6	6	100
21	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan	50	50	100
22	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	6	6	100
23	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	6	6	100
24	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu)	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	6	6	100
25	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	6	6	100

Secara umum dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang memenuhi target tersebut tidak memiliki hambatan/kendala yang cukup berarti karena dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

c. Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target yang Direncanakan

Sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 terdapat terdapat realisasi program/kegiatan yang melebihi target yang direncanakan, yaitu pada Tabel 2.4 berikut ini:

Tabel 2.4
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang Melebihi Target yang Ditetapkan pada Triwulan II Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	344	352	102,33
2	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Validasi Data Aset OPD	50	58	116
3	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Validasi Data Aset OPD	50	58	116

Pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN terdapat realisasi yang melebihi target yang ditetapkan karena terdapat 6 (enam) orang CPNS baru yang berasal dari lulusan Sekolah Tinggi Transportasi Darat.

2.1.1 Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan Pagu Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II. Rincian pagu beserta realisasi anggaran tersaji pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.5
Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.529.700.231,00	2.523.260.283,00	45,63
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.615.580,00	25.087.270,00	63,33
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.446.180,00	20.337.980,00	69,07
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.169.400,00	4.749.290,00	46,70
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.670.637.627,00	2.207.191.291,00	60,13
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.655.908.017,00	2.199.925.741,00	60,17
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	14.729.610,00	7.265.550,00	49,33
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.823.220,00	5.133.700,00	47,43
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	10.823.220,00	5.133.700,00	47,43
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	67.592.700,00	59.075.100,00	87,40
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11.960.700,00	5.963.100,00	49,86
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	55.632.000,00	53.112.000,00	95,47
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	141.641.669,00	53.583.440,00	37,83
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51.263.669,00	35.910.800,00	70,05
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.000.000,00	9.000.000,00	50,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72.378.000,00	8.672.640,00	11,98
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	142.469.140,00	68.053.297,00	47,77
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80.087.140,00	43.183.297,00	53,92
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	62.382.000,00	24.870.000,00	39,87
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	178.184.460,00	105.136.185,00	59,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	166.184.460,00	105.136.185,00	63,26
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.000.000,00	0,00	0,00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
8	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.278.735.835,00	0,00	0,00
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.278.735.835,00	0,00	0,00
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	13.193.354.405,00	6.574.352.339,00	49,83
9	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	12.039.048.271,00	6.212.845.474,00	51,61
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	11.948.248.271,00	6.142.798.474,00	51,41
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	90.800.000,00	70.047.000,00	77,14
10	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	139.398.800,00	59.110.000,00	42,40
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	139.398.800,00	59.110.000,00	42,40
11	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	525.508.734,00	97.641.465,00	25,46
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	316.508.734,00	133.814.465,00	42,28
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100.000.000,00	0,00	0,00
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	109.000.000,00	0,00	0,00
12	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	313.113.800,00	100.721.200,00	32,17
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	313.113.800,00	100.721.200,00	32,17
13	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	104.280.000,00	51.720.000,00	49,60
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit, dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	104.280.000,00	51.720.000,00	49,60
14	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	72.004.800,00	16.141.200,00	22,42
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	72.004.800,00	16.141.200,00	22,42
III	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	45.776.326,00	18.374.000,00	40,14
15	Penerbitan Izin Usaha Angkutan laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	45.776.326,00	18.374.000,00	40,14

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
	Penebitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	45.776.326,00	18.374.000,00	40,14
Total		18.768.830.962,00	9.115.986.622,00	48,57

Berdasarkan Tabel diatas terlihat bahwa jumlah realisasi Belanja pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp 18.768.830.962,00 dari anggaran perubahan yang telah ditetapkan sebesar Rp 9.115.986.622,00 atau mencapai 48,57% dengan realisasi fisik sebesar 51,89%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dimana disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
6. Sosial

Merujuk pada hal diatas, maka Dinas Perhubungan tidak melakukan pengukuran Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Adapun pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) dapat kami uraikan pada Tabel 2.6 berikut ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah
sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024

No	Indikator Kinerja berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	SPM/ Standar Nasional	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi capaian Tahun-				Proyeksi Tahun		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2024	2025	
1	Rasio konektivitas kabupaten/kota	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5	-	0,5	0,5	
2	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	-	-	0,35	0,34	0,33	0,32	0,31	0,35	0,35	0,26	0,26	0,25	0,24	
3	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan tipe C	-	-	35,29	37,25	39,22	43,14	47,06	35,29	37,25	39,22	39,22	39,22	39,22	
4	Terlaksananya pelayanan uji berkala (persentase kendaraan laik jalan)	-	-	95	96	97	98	99	65,00	86,82	55,96	30,38	98	99	
5	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	-	-	-	20	40	60	80	-	19,2	40	50	60	80	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Masih minimnya sumber daya manusia di Bidang Perhubungan;
2. Kurangnya anggaran pemeliharaan fasilitas keselamatan jalan, sementara pada sisi lain masa pakai sebagian besar fasilitas keselamatan jalan tersebut telah melampaui umur teknis yang dipersyaratkan, misalnya pada semua APILL/traffic light yang ada di wilayah Kabupaten Lombok Tengah;
3. Belum optimalnya pelayanan angkutan umum sebagai penghubung pusat-pusat kegiatan di kecamatan. Permasalahan ini berkaitan dengan tidak beroperasinya sebagian besar trayek yang telah ditetapkan oleh SK Bupati Lombok Tengah dan masih kurangnya pelayanan Terminal Tipe C (Terminal Mujur).
4. Rendahnya *load factor* (faktor muat) penumpang yang menggunakan angkutan umum
5. Penyediaan fasilitas keselamatan jalan yang masih minim dibandingkan dengan jumlah ruas jalan kabupaten
6. Belum optimalnya pelayanan parkir
7. Angka dan tingkat fatalitas kecelakaan yang masih cukup tinggi
8. Tidak tertampungnya beberapa kegiatan yang merupakan skala prioritas Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah pada APBD.

Tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah dalam meningkatkan pelayanannya yaitu:

- a. Tantangan yang dihadapi antara lain:
 - Jumlah penduduk Kabupaten Lombok Tengah yang semakin meningkat
 - Dijadikannya Mandalika sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Super Prioritas dan adanya event-event internasional pada Pertamina Mandalika International Street Circuit

- Meningkatnya rute dan volume penerbangan yang dilayani oleh Bandara Internasional Lombok
- Besarnya intensitas penggunaan kendaraan pribadi di Kabupaten Lombok Tengah

b. Peluang yang ada antara lain:

- Adanya regulasi yang memadai
- Adanya keterbukaan informasi publik, sehingga akan berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat
- Adanya sinergi terkait strategi dan upaya penanganan masalah transportasi antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Pusat

Dari permasalahan, hambatan, tantangan dan peluang yang dihadapi tersebut maka dapat disusun isu-isu strategis yang penting untuk ditindaklanjuti dalam perumusan dan program kegiatan prioritas, yaitu sebagai berikut:

1. Belum optimalnya keselamatan, ketertiban, dan kelancaran transportasi, yang meliputi:
 - a. Masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas, terutama pada daerah rawan kecelakaan
 - b. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kedisiplinan dan ketertiban lalu lintas
 - c. Kurangnya fasilitas keselamatan jalan
 - d. Penyediaan lahan parkir yang memadai di beberapa titik rawan kemacetan serta perlunya peningkatan penertiban parkir liar
 - e. Masih kurangnya sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor
 - f. Kurangnya kompetensi teknis serta sarana dan prasarana aparatur yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah dalam mendukung kelancaran pelayanan di bidang perhubungan.

2. Belum optimalnya kualitas layanan angkutan, yang meliputi:
 - a. Meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi serta menurunnya minat masyarakat dalam menggunakan angkutan umum
 - b. Fasilitas pendukung transportasi (seperti terminal dan shelter) memerlukan penanganan lebih lanjut agar dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat pengguna jasa transportasi
 - c. Semakin berkembangnya angkutan tidak dalam trayek (online) di saat menurunnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Pada Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah telah menyampaikan usulan anggaran tambahan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Cq. Kepala Bidang Anggaran BKAD Kabupaten Lombok Tengah. Usulan-usulan tersebut diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan kantor yang dapat mengganggu pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah, terutama usulan anggaran pemeliharaan APILL/Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (traffic light) yang sudah sering mengalami kerusakan bahkan mati total karena masa pakai yang telah melampaui umur teknis yang dipersyaratkan, terutama pada APILL yang berada di Simpang 4 Kodim, Simpang 3 PLN, dan Simpang 4 Toyang.

Namun karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah, usulan-usulan tersebut belum dapat diakomodir. Perubahan anggaran hanya terjadi pada anggaran Kegiatan Gaji dan Tunjangan ASN yang mengalami penyesuaian berdasarkan kebutuhan jumlah pegawai yang ada. Untuk lebih lengkapnya hal tersebut disajikan pada Tabel 3.1 berikut ini:

NO	KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	REKAMAT PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARUJH BERSIH PERSEK PERSEKUAN	REALISASI CAPAIAN (SALAH SATU DARI 3) (Tahun 2020)	KAPASITAS TARGET BERAS (SALAH SATU DARI 3)	JAPANESE BUREAU FOR ECONOMIC RECONSTRUCTION										KELUMPUNAN BAWAHAN	PENGALIHAN BALAI BERSIHAKA TAHUN 2020		PENANJANG SURAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2020		PAGU BERSIH (Rp)		Sembelih/bekas (15-17)	LOKASI	KEMERIAK BAKA	PRIORITY		TARGET		PAGU BERSIH (Rp)			
							BERSEK	BERSEK	APRIL 2020	MEI 2020				BERSEK	BERSEK				BERSEK		BERSEK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	10.01.1	000000	Perbaikan Pradaban dan Pemertanian Kerdas					7 Paket	7 Paket	41.880.000,00	51.263.480,00	51.263.480,00	5.754.810,00	Sub. Lokasi: Tegal, Bantul, Sleman, Gunung Kidul	SKEMA TRACER 70 LAMAR-GAMA AL-CRASH CARMA	Membuat dan pasang Unit Monev/Unit Pengawasan Desa	1. Perencanaan: membuat jajar dan pasang kepanitiaan			77.000.000,00	DEKAS PERKUBSIKAS
2	10.01.2	000000	Perbaikan (Bahan Logistik) Kerdas					10 Paket	10 Paket	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Sub. Lokasi: Tegal, Bantul, Sleman, Gunung Kidul	SKEMA TRACER 70 LAMAR-GAMA AL-CRASH CARMA	Membuat dan pasang Unit Monev/Unit Pengawasan Desa	1. Perencanaan: membuat jajar dan pasang kepanitiaan			30.000.000,00	DEKAS PERKUBSIKAS
3	10.01.3	000000	Perbaikan dan Pasok Kerdas dan Kerdas (SMD)					5 Lahan	5 Lahan	12.375.000,00	12.375.000,00	12.375.000,00	0,00	Sub. Lokasi: Tegal, Bantul, Sleman, Gunung Kidul	SKEMA TRACER 70 LAMAR-GAMA AL-CRASH CARMA	Membuat dan pasang Unit Monev/Unit Pengawasan Desa	1. Perencanaan: membuat jajar dan pasang kepanitiaan			30.000.000,00	DEKAS PERKUBSIKAS
4	10.01.4	0000	Perbaikan (Bahan Logistik) Kerdas					100 %	100 %	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Sub. Lokasi: Tegal, Bantul, Sleman, Gunung Kidul	SKEMA TRACER 70 LAMAR-GAMA AL-CRASH CARMA	Membuat dan pasang Unit Monev/Unit Pengawasan Desa	1. Perencanaan: membuat jajar dan pasang kepanitiaan			1.000.000,00	DEKAS PERKUBSIKAS
5	10.01.5	000000	Perbaikan Kerdas (Operasional) dan Pasokan					1 Lahan	1 Lahan	0,00	1.278.730.430,00	1.278.730.430,00	1.278.730.430,00	Sub. Lokasi: Tegal, Bantul, Sleman, Gunung Kidul	SKEMA TRACER 70 LAMAR-GAMA AL-CRASH CARMA	Membuat dan pasang Unit Monev/Unit Pengawasan Desa	1. Perencanaan: membuat jajar dan pasang kepanitiaan			1.000.000.000,00	DEKAS PERKUBSIKAS
6	10.01.6	0000	Perbaikan (Bahan Logistik) Kerdas					100 %	100 %	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	6.750.497,00	Sub. Lokasi: Tegal, Bantul, Sleman, Gunung Kidul	SKEMA TRACER 70 LAMAR-GAMA AL-CRASH CARMA	Membuat dan pasang Unit Monev/Unit Pengawasan Desa	1. Perencanaan: membuat jajar dan pasang kepanitiaan			100.000.000,00	DEKAS PERKUBSIKAS
7	10.01.7	000000	Perbaikan (Bahan Logistik) Kerdas					10 Lahan	10 Lahan	70.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	8.750.497,00	Sub. Lokasi: Tegal, Bantul, Sleman, Gunung Kidul	SKEMA TRACER 70 LAMAR-GAMA AL-CRASH CARMA	Membuat dan pasang Unit Monev/Unit Pengawasan Desa	1. Perencanaan: membuat jajar dan pasang kepanitiaan			80.000.000,00	DEKAS PERKUBSIKAS
8	10.01.8	000000	Perbaikan (Bahan Logistik) Kerdas					10 Lahan	10 Lahan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Sub. Lokasi: Tegal, Bantul, Sleman, Gunung Kidul	SKEMA TRACER 70 LAMAR-GAMA AL-CRASH CARMA	Membuat dan pasang Unit Monev/Unit Pengawasan Desa	1. Perencanaan: membuat jajar dan pasang kepanitiaan			50.000.000,00	DEKAS PERKUBSIKAS
9	10.01.9	0000	Perbaikan (Bahan Logistik) Kerdas					100 %	100 %	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	37.750.000,00	Sub. Lokasi: Tegal, Bantul, Sleman, Gunung Kidul	SKEMA TRACER 70 LAMAR-GAMA AL-CRASH CARMA	Membuat dan pasang Unit Monev/Unit Pengawasan Desa	1. Perencanaan: membuat jajar dan pasang kepanitiaan			100.000.000,00	DEKAS PERKUBSIKAS
10	10.01.10	000000	Perbaikan (Bahan Logistik) Kerdas					40 Lahan	40 Lahan	160.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	10.000.000,00	Sub. Lokasi: Tegal, Bantul, Sleman, Gunung Kidul	SKEMA TRACER 70 LAMAR-GAMA AL-CRASH CARMA	Membuat dan pasang Unit Monev/Unit Pengawasan Desa	1. Perencanaan: membuat jajar dan pasang kepanitiaan			160.000.000,00	DEKAS PERKUBSIKAS
11	10.01.11	000000	Perbaikan (Bahan Logistik) Kerdas					1 Lahan	1 Lahan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Sub. Lokasi: Tegal, Bantul, Sleman, Gunung Kidul	SKEMA TRACER 70 LAMAR-GAMA AL-CRASH CARMA	Membuat dan pasang Unit Monev/Unit Pengawasan Desa	1. Perencanaan: membuat jajar dan pasang kepanitiaan			30.000.000,00	DEKAS PERKUBSIKAS
12	10.00	PROGRAM PENYELIDIKAN LANSI LINTAS DAN BAKHTIYAN JALAN LULUS	Perbaikan jalan					64,2 %	64,2 %	10.244.875.828,00	11.003.533.840,00	11.003.533.840,00	2.484.998.310,00							10.011.488.698,00	
13	10.01.12	0000	Perbaikan (Bahan Logistik) Kerdas					9,76 %	9,76 %	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00							10.000.000,00	DEKAS PERKUBSIKAS
14	10.01.13	000000	Perbaikan (Bahan Logistik) Kerdas					1 Lahan	1 Lahan	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	10.000.000,00	Sub. Lokasi: Tegal, Bantul, Sleman, Gunung Kidul	SKEMA TRACER 70 LAMAR-GAMA AL-CRASH CARMA	Membuat dan pasang Unit Monev/Unit Pengawasan Desa	1. Perencanaan: membuat jajar dan pasang kepanitiaan			10.000.000,00	DEKAS PERKUBSIKAS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKARAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						REKORSAH/BERKAS (16-17)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		HELOMPOK SASARAN	PRAKARAAN INJAK BENCANA TAHUN 2023		PERINGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			18				19	20		21		
							SEBELUM	SEDUJAH	RKPD 2024	APSD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	15.03.3.01	Pembelian Jasa Usaha Angkutan Laut (Pelayanan Rel per Day) Dengan Penanganan atau Sistem Usaha yang Berorientasi dan yang Berorientasi pada Lintas Puluhan dan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembelian PAS Rel Angkutan Laut				90 %	95 %	40.238.830,00	45.770.320,00	45.770.320,00	367.100,00			Meningkatkan Kualitas Jasa dan Kualitas Layanan	1. Meningkatkan kualitas jasa dan kualitas layanan	Perilaku Angkutan Laut di Wilayah 701		80.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15.03.2.01.000	Sistem dan Peralatan Pengawasan (Pelayanan dan Usaha Angkutan Laut) Penanganan (Tahap) Penanganan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Keaktifan dan Sistematis (Perencanaan Pelayanan dan Usaha Angkutan Laut) Penanganan Nasional dan Regional Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	40.238.830,00	45.770.320,00	45.770.320,00	367.100,00	Kab. Lombok Tengah, Sempu Kecamatan Sempu Kabupaten Lombok Tengah	DANA TRANSFER DESA DAN DANA AKORAWI LARUS	Meningkatkan Kualitas Jasa dan Kualitas Layanan	1. Meningkatkan kualitas jasa dan kualitas layanan		80.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
J U M L A H									11.282.840.150,00	18.768.820.000,00	18.696.632.388,00	1.863.892.278,00							21.987.001.217,00		

Praya, 31 Juli 2024
 Kepala Dinas Perhubungan
 Kabupaten Lombok Tengah,



DRS. H. LALU HERDAN, M.Si
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19690815 198903 1 007

BAB IV

PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah yang menjadi acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023. Ada beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Rencana Kerja tahun selanjutnya yaitu sebagai berikut:

1. Perlunya ketersediaan fasilitas keselamatan jalan terutama pada daerah-daerah rawan kecelakaan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas
2. Perlunya manajemen dan rekayasa lalu lintas yang didukung oleh sarana dan prasarana jalan maupun terminal yang memadai, terutama pada saat gelaran event nasional maupun internasional di KEK Mandalika
3. Perlunya perhatian pada ketersediaan sarana dan prasarana di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor terutama untuk persyaratan peningkatan akreditasi dan layanan kepada masyarakat
4. Perlunya Langkah-langkah inovatif dalam menyelesaikan permasalahan transportasi/angkutan umum di Kabupaten Lombok Tengah
5. Pengembangan transportasi laut selain diarahkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir khususnya nelayan dan sekaligus untuk meningkatkan pendapatan daerah.
6. Untuk mencapai keberhasilan dari program pada Rencana Kerja Perubahan ini, maka capaian kinerja hendaknya dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu.

Praya, 31 Juli 2024

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lombok Tengah



DRS. I. LALU HERDAN, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19690815 198903 1 007

LAMPIRAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.000.000.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Seseoran	: Dinas Perhubungan Kab. Lombok Tengah Kab. Lombok Tengah
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 3.893.709.441,00
Alokasi 2025	: Rp. 4.276.433.325,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP OPD Nilai SAKIP OPD	B Predikat B Predikat
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.893.709.441,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan
Hasil	Persentase temuan Hasil Pemeriksaan Keuangan OPD yang ditindaklanjuti	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 3.893.709.441,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.893.709.441,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 3.893.709.441,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 2.542.960.783,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 1.951.241.972,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 1.908.188.050,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Gaji Pokok Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.908.188.059,00
	[-] Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 1.908.188.059,00
	Belanja Gaji Pokok PNS	1	Tahun	1.908.188.059,20	0 %	Rp. 1.908.188.059,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK					Rp. 43.053.913,00
	[#] Belanja Gaji Pokok Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 43.053.913,00
	[-] Belanja Gaji Pokok PPPK					Rp. 43.053.913,00
	Belanja Gaji Pokok PPPK	1	Tahun	43.053.912,96	0 %	Rp. 43.053.913,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 193.733.519,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 193.733.519,00
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 193.733.519,00
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 193.733.519,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1	Tahun	193.733.519,00	0 %	Rp. 193.733.519,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					Rp. 0,00
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 0,00
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					Rp. 0,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1	Tahun	-	0 %	Rp. 0,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 106.513.792,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 106.513.792,00
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 106.513.792,00
	[-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 106.513.792,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1	Tahun	106.513.792,00	0 %	Rp. 106.513.792,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp. 95.271.180,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp. 95.271.180,00
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 95.271.180,00
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp. 95.271.180,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1	Tahun	95.271.180,00	0 %	Rp. 95.271.180,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 64.704.640,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 64.704.640,00
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 64.704.640,00
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 64.704.640,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1	Tahun	64.704.640,00	0 %	Rp. 64.704.640,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK					Rp. 2.730.848,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.730.848,00
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK					Rp. 2.730.848,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1	Tahun	2.730.848,00	0 %	Rp. 2.730.848,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 121.461.218,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 117.405.218,00
	[#] Belanja Tunjangan Beras Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 117.405.218,00
	[-] Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 117.405.218,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1	Tahun	117.405.218,00	0 %	Rp. 117.405.218,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK					Rp. 4.056.000,00
	[#] Belanja Tunjangan Beras Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.056.000,00
	[-] Belanja Tunjangan Beras PPPK					Rp. 4.056.000,00
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1	Tahun	4.056.000,00	0 %	Rp. 4.056.000,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 5.212.430,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 5.212.430,00
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.212.430,00
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 5.212.430,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1	Tahun	5.212.430,00	0 %	Rp. 5.212.430,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 2.026.707,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 2.026.707,00
	[#] Belanja Pembulatan Gaji Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.026.707,00
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 2.026.707,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1	Tahun	2.026.707,00	0 %	Rp. 2.026.707,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK					Rp. 64.477,00
	[#] Belanja Pembulatan Gaji Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 64.477,00
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PPPK					Rp. 64.477,00
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1	Tahun	64.477,00	0 %	Rp. 64.477,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp. 1.317.193.658,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp. 1.317.193.658,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 1.317.193.658,00
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.317.193.658,00
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 1.317.193.658,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1	Tahun	1.317.193.658,00	0 %	Rp. 1.317.193.658,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 33.555.000,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah					Rp. 33.555.000,00
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum					Rp. 33.555.000,00
	[#] Tambahan Penghasilan atas Insentif Pemungutan Retribusi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 33.555.000,00
	[-] Insentif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum					Rp. 33.555.000,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1	Tahun	33.555.000,00	0 %	Rp. 33.555.000,00
5.1.01.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor					Rp. 0,00
	[#] Tambahan Penghasilan atas Insentif Pemungutan Retribusi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 0,00
	[-] Insentif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor					Rp. 0,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	1	Tahun	-	0 %	Rp. 0,00
Jumlah :						Rp. 3.893.709.441,00
				Kab. Lombok Tengah..... Kepala Dinas Perhubungan  Drs. H. LALU HERDAN, M.Si NIP. 198908151989031007		

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	H. LALU FIRMAN WIJAYA, ST., MT	197005042000031007	KETUA TAPD	
2	TAUFIKURRAHMAN PUA NOTE, S.Pt., M.Sc., M.Eng	197305101999021001	WAKIL KETUA TAPD	
3	Drs. H. MUHAMAD ZARKASI	196607061993031015	WAKIL KETUA TAPD	
4	LALU WIRANATA, S.IP., MA	197611282005011006	WAKIL KETUA TAPD	
5	KORIATMAJA, SE., MM	197312311994021015	SEKRETARIS TAPD	